

PENDIDIKAN DALAM KONTEKS SOSIAL EKONOMI

Education In Social Economic Context

Mochamad Syawie

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang, Jakarta Timur
e-mail: msyawie@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini merupakan catatan dari beberapa konsep tentang makna pendidikan dalam konteks sosial ekonomi. Tujuan artikel ingin mengungkap tentang konsep yang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengaktualkan potensi manusia sehingga benar-benar menjadi manusia sejati, yang mengaktualkan berbagai potensinya untuk dapat benar-benar menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang penuh makna, bagi orang lain dan bagi dirinya sendirinya. Pendidikan juga bermakna dalam mengembangkan kemampuan dan ketrampilan yang kita miliki dalam mencapai kebahagiaan hidup. Karena itu, pendidikan sangat diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan - education for the knowledge economy. Dalam konteks itu, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan (research and development) yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung education for the knowledge economy.

Kata kunci: pendidikan, konteks sosial ekonomi

Abstract

This article is a note taken from several concepts regarding the meaning of education in social economic. The article wish to describe the concept stating that education is an activity to actualize individual potential resources in order to achieve their development task, as for instance, mentioned by Abraham Maslow (a "meaningfull and usefull" individual for their own and for the environment benefit). Education is also a mean to have individual abilities and skills developed for individual life happiness. Therefore, education is important to complement knowledge based economic development - education for the knowledge economy. In this criterion, education should also include research and development activity that produce high rating research supported the knowledge based economic education

Keywords : education, social economic context

PENDAHULUAN

Howard Gardner, ahli pendidikan terkemuka dari Harvard, sebagaimana dikutip Bagir (2012), dalam bukunya yang paling mutakhir berjudul *Truth, Beauty, and Goodness Reframed, Educating for the Vietues in the Twenty First Century*, seperti menyesali pemikiran-pemikiran pendidikannya sendiri yang terdahulu. Sebab, meski sudah menawarkan paradigma kecerdasan

majemuk (*multiple intelligences*) yang amat revolusioner bagi dunia pendidikan, sebelumnya ahli psikologi ini tetap saja cenderung melihat pendidikan lebih dari sudut pandang dua disiplin yang amat dominan pada masa-masa modern ini: biologi dan ekonomi. Dengan kata lain perspektifnya lebih materialistis dan pragmatis. Maka, dalam buku terbarunya ini, Gardner

merasa perlu melihat upaya-upaya perumusan pendidikan dari sudut pandang yang lebih humanioristik, yang meliputi sudut pandang filsafat, psikologi, sejarah, dan studi budaya (*cultural studies*).

Apa tujuan pendidikan? Kalau mau ringkas, memanusiaikan manusia. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengatualkan potensi manusia sehingga benar-benar menjadi manusia sejati, yakni mengatualkan berbagai potensinya untuk dapat benar-benar menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang penuh makna, bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri (Bagir, 2012). Mengutip ungkapan E.F. Schumacher dalam buku klasiknya yang luar biasa, *Small is Beautiful*, pendidikan kita hendaknya tak hanya menekankan pada *know how*, tapi justru harus mengembangkan aspek *know-why* nya, yakni makna (*meaning*) dari kemampuan dan ketrampilan yang kita miliki itu dalam mencapai kebahagiaan hidup (Bagir, 2012).

Negara di dunia tak tak henti-hentinya membangun sistem pendidikan. Karena di era yang berbasis pengetahuan ekonomi seperti saat ini, pendidikan yang berkualitas akan mampu menempatkan negara dan bangsa bersangkutan berjaya dalam banyak hal. Sebutlah dalam bidang ekonomi, kesehatan, kemakmuran, daya saing dan teknologi. Oleh sebab itu, hampir semua negara di dunia saat ini selalu melakukan pembaruan, atau paling tidak merancang perubahan dalam bidang pendidikan, betapa pun kecilnya (Suyanto, 2013).

Kesulitan, atau bahkan kebingungan, dalam setiap pembicaraan mengenai pendidikan mungkin bersumber pada kenyataan bahwa lembaga ini merefleksiskan masalah –masalah atau tantangan mendalam yang dihadapi Indonesia. Pembicaraan mengenai filsafat dan kebijaksanaan pendidikan selalu dengan sendirinya menuntut kejelasan wawasan masa lalu, kebutuhan-kebutuhan mendesak masa

depan dan harapan subyektif masa depan. Jika wawasan terhadap ketiga dimensi kesejarahan dari suatu masyarakat dan negara ini kabur atau penuh keporak-porandakan, maka sulitlah diharapkan suatu filsafat dan kebijaksanaan yang jernih dan mantap (Bulkin, 1986). Pendidikan dengan demikian merupakan lembaga yang sarat dengan beban kesejarahan. Melalui lembaga ini suatu masyarakat akan melestarikan nilai-nilai, etika dan kekuatan spiritual yang tercerna dalam sejarah dan diharapkan akan mampu melanggengkan masyarakat itu.

Pearson, pada November 2012, sebagaimana dikutip Suyanto (2013), meluncurkan data mengenai peringkat kualitas pendidikan di 50 negara. Data itu merupakan hasil penelitian pendidikan global terbaru yang dilakukan secara independen oleh *Economist Intelligence Unit, Pearson*. Hasil penelitian global itu kemudian disajikan dalam *The Learning Curve Report* oleh Pearson. Laporan yang sangat monumental itu sejak awal dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan pendidikan, tokoh pendidikan, dan akademisi jika mereka ingin mengidentifikasi faktor penting apa saja yang bisa mendorong dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan. *The Learning Curve Report* juga menyajikan indeks global baru tentang keterampilan kognitif dan pencapaian (prestasi) pendidikan suatu negara dengan mendasarkan diri pada data nilai hasil tiga jenis penilaian hasil belajar siswa secara internasional.

Pertama, *The Programme for International Student Assessment*, sebuah studi berskala internasional yang dilakukan *Organization of Economic Co-operation and Development* di negara anggota ataupun non anggota dalam bidang performa skolastik. Penilaian difokuskan pada penguasaan bidang matematika, sains, dan membaca bagi siswa usia 15 tahun. Kedua, *The Trends in International Mathematic and Science Study*, sebuah penilaian internasional dalam mata pelajaran Matematika dan Sains bagi siswa

kelas IV dan VIII di seluruh dunia. Penilaian jenis ini dikembangkan di *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) yang bertujuan untuk memungkinkan negara peserta membandingkan prestasi siswa antar negara dalam mata pelajaran matematika dan sains. Ketiga, *The Progress in International Reading Literacy Study*, sebuah studi internasional tentang prestasi siswa kelas IV dalam mata pelajaran membaca. Studi ini juga dilakukan IEA.

Bagaimana peringkat indeks kualitas pendidikan yang dihasilkan *The Learning Curve Report*. Sangat menakjubkan. Betapa tidak. Masih mengutip pendapat Suyanto (2013), bahwa negara-negara yang pernah hebat seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Selandia Baru, Inggris dan Australia kini sudah tidak lagi menduduki lima terbaik pendidikan dunia. Sebaliknya, Finlandia dan Korea Selatan menduduki peringkat pertama dan kedua dalam indeks kualitas pendidikan dunia. Termasuk Negara peringkat lima terbaiknya berikutnya setelah Finlandia dan Korea Selatan adalah Hongkong, Jepang dan Singapura. Kalau mau melihat peringkat sepuluh terbaik dunia, tinggal menambah lima negara berikutnya, yakni Inggris, Belanda, Selandia Baru, Swiss, dan Kanada. Amerika Serikat berada pada peringkat ke-17 setelah Jerman dan Belgia. Peringkat lima terendah diduduki Kolombia, Thailand, Meksiko, Brasil, dan Indonesia.

The Learning Curve Report menyebut Finlandia dan Korea Selatan sebagai Negara “*education superpowers*” dengan *Z-score* masing-masing 1,26 dan 1,23 (nilai itu lebih tinggi di atas rata-rata dan lebih dari satu standar deviasi di atas *mean*). Alhasil, tiga Negara yang sudah lama bertengger di papan atas, yaitu Hongkong, Jepang dan Singapura, dapat tergeser ke peringkat di bawah mereka. Lebih menarik lagi, dua negara “adikuasa” di bidang pendidikan itu menggunakan sistem manajemen pendidikan

yang sangat berbeda, baik dilihat dari sisi proses belajar-mengajar maupun persekolahannya.

Di Korea Selatan, sistem pendidikan lebih memiliki karakteristik serba terstruktur. Siswa secara ketat harus terlibat dalam proses yang padat, dan proses belajar di sekolah lebih banyak berorientasi pada tes. Sementara di Finlandia, proses belajar lebih rileks, menyenangkan, fleksibel, lebih banyak pilihan bagi siswa sesuai minat dan kecepatan belajarnya. Meski demikian, menurut *The Learning Curve Report*, kedua negara itu memiliki performa pendidikan yang secara statistik sama baik.

Kemudian menurut Suyanto (2013), kita patut bertanya, sebenarnya faktor apa di luar perbedaan sistem yang mereka anut yang menyebabkan baik Finlandia maupun Korea Selatan mampu menjadi negara adikuasa di bidang pendidikan. Laporan *Studi Global The Learning Curve* menemukan faktor universal yang sangat berpengaruh pada tingginya kualitas pendidikan di dua negara tersebut. Pertama, dimilikinya sistem pendidikan dan pengembangan produksi guru yang berkualitas tinggi. Kedua, dimilikinya akuntabilitas yang tinggi pada sistem nilai (*value system*) dan ditegakkannya misi moral yang kuat yang melandasi semua upaya pengembangan pendidikan.

Dengan demikian, dapat dipastikan tidak ada politisasi dunia pendidikan di kedua negara itu. Temuan itu juga dapat dijadikan pelajaran, jika kita akan membangun pendidikan dengan hasil yang lebih baik, tidak usah tergopoh-gopoh meniru sistem manajemen pendidikan negara lain tanpa mengkaji kecocokan dan relevansinya dengan sistem nilai dan budaya yang kita miliki. Memang ada kecenderungan di negara-negara maju yang makin mengarah pada upaya penyediaan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik, sebagaimana dilansir oleh *the Organization for Economic Co-operation and development* (OECD), (2010), sebagaimana dikutip (Elin Driana, 2013; 6), ekonomi berbasis

pengetahuan yang jadi tulang punggung pembangunan sebuah bangsa di era ini menuntut kesiapan insan-insan terdidik sebagai penggerak utamanya. Karena itu, penyediaan layanan pendidikan bermutu kepada setiap warga negara tidak dapat ditawar lagi.

PEMBAHASAN

Perspektif Sosial

Meminjam perspektif Soedjatmoko, sang humanis dan intelektual bebas pada zamannya, sebagaimana dikutip Sahrasad (2012, h. 38), bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan modal paling penting dan menentukan dari suatu bangsa, lebih dari pemilikan sumber daya alam. Nasionalisme baru berbasis kualitas SDM itu yang membuat manusia Indonesia bisa bermartabat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa lain.

Pembangunan SDM yang memiliki pengetahuan modern, kecakapan ilmu dan teknologi, merupakan proses belajar yang harus dilakukan seumur hidup bila bangsa kita hendak *survive* dalam globalisme yang mencekam dan memangsa bangsa-bangsa yang lemah atau rentan karena kurangnya pendidikan. Bagi Indonesia nasionalisme baru yang berbasis pada ilmu-teknologi, moralitas dan kemanusiaan, merupakan pembentuk identitas kebangsaan yang kokoh dan kenyal. Nasionalisme baru lebih menekankan tindakan nyata, peduli dan jujur untuk kepentingan nasional dan bangsanya, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Di era globalisasi ini, banyak pihak cemas dan khawatir bahwa para elite bisnis di Indonesia, menjadikan nasionalisme baru sebagai alat untuk mencapai kepentingan sempit dan tujuan tertentu, misalnya para pengusaha berinvestasi di luar negeri hanya karena meminimalkan resiko jika terjadi huru-hara di Jakarta dan kota lainnya. Apalagi selama ini, perspektif “nasionalisme resmi” (*official*

nasionalism) lebih dominan karena menjadi wacana elite penguasa, pengusaha dan pejabat Negara (Sahasrad, 2012).

Karena itu, nasionalisme baru harus ditafsirkan sebagai sebuah kekuatan inklusif dan membebaskan. Meminjam bahasa Anthony Smith, segala bentuk, bentuk lokalitas wilayah, dialek, adat istiadat dan klan terpinggirkan. Atas nama nasionalisme, terbentuklah sebuah Negara bangsa yang besar, yang mampu memusatkan pasar, sistem administrasi, perpajakan, dan pendidikan. Semangatnya adalah kerakyatan dan demokratis. Melalui nasionalisme, segala bentuk sistem nilai yang feodalistik dan kekuatan penjajah yang opresif berpeluang untuk dijangkalkan. Nasionalisme baru itu, pada gilirannya menjadi modal bagi lahirnya kedaulatan rakyat serta penentuan nasib mereka secara independen. Nasionalisme baru merupakan kontinuitas (dengan “*some improvement*”) atas nasionalisme lama di abad ke -19 dan 20-an yang dimanifestasikan dalam gerakan elite pribumi melawan penguasa kolonial serta berbagai sistem administrasi yang mendukungnya (Anthony Smith, 1998, dalam Sahrasad, 2012)

Bagaimanapun, meminjam perspektif Anthony D. Smith sebagaimana dikutip Sahrasad (2012), teori nasionalisme mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tergantung pendekatan apa yang digunakan. Pandangan yang mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah entitas yang konkrit, yang didasarkan pada latar sejarah dan kehidupan sosial, masyarakatnya *homogeny* dan bersatu, serta mencerminkan aktor sosial dan politik utama dalam dunia modern, dalam tiga puluh tahun terakhir ini, nampaknya tidak lagi dapat dipertahankan. Pikiran baru mengenai nasionalisme semacam itu mengindikasikan bahwa monopoli interpretasi dan sentralisasi pengertian tentang nasionalisme harus digantikan oleh demokratisasi pemahaman secara lebih substansial. Di sini nasionalisme baru memiliki relevansinya dengan dinamika situasi.

Dalam perspektif sosial, pendidikan cenderung akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang mengarah ke pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru itu terdiri dari lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam mengukuhkan daya rekat sosial (*social cohesion*). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas, perkumpulan masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial (Alhumami, 2012).

Dalam perspektif budaya, pendidikan juga merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, menyosialisasikan nilai, dan menanamkan etos (pengetahuan, kemajuan, dan kerja-kerja produktif) di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Peran pendidikan bahkan menjadi lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang acap kali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks itu, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun - meminjam istilah Emile Durkheim- sebagaimana dikutip Alhumami (2012), kesadaran kolektif (*collective consciousness*) sebagai warga bangsa dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku bangsa dan agama sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.

Hafid Abbas (2013), mengabarkan bahwa pendidikan nasional kelihatannya gagal berkontribusi bagi kemajuan keilmuan dan peradaban modern. Sejak 1985 hingga 2007, penetapan Hak atas Kekayaan Intelektual di seluruh perguruan tinggi Indonesia hanya 419. Padahal, jumlah pendidikan tinggi di Tanah Air, yang sangat berpotensi menghasilkan karya-karya ilmiah bagi pemajuan pembangunan bangsa dan peradaban modern umat manusia, mendekati 4.000. Bandingkan Singapura yang hanya punya 5 perguruan negeri dan beberapa swasta, tetapi menyumbangkan sekitar 10.000 hak paten. Mereka tercatat penyumbang aplikasi hak paten di urutan ke 16 terbesar di dunia. Jepang di urutan pertama dengan sekitar 440.000 hak paten, di susul AS dengan sekitar 390.000 hak paten, lalu diikuti China, Korea, dan Jerman (*World Patent Report*, 2007). Indonesia belum tercatat dalam urutan tersebut karena belum memberi andil bagi perkembangan peradaban modern umat manusia.

Masih menurut Hafid Abbas (2013), pendidikan nasional ternyata kurang terlihat dampaknya pada peningkatan kualitas SDM bangsa. Laporan UNDP 1998, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di urutan ke-103. Dua tahun kemudian, posisi ini terus bergerak menurun ke-109. Sebaliknya, Singapura menanjak dari urutan ke-34 menjadi ke-24. Bahkan Vietnam menanjak dari ke-121 jadi ke-108 sehingga malampai posisi Indonesia. Keadaan ini cenderung terus memburuk. Pada 2011 dan 2012, Indonesia di posisi ke-124 dari 187 negara di dunia, amat jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Selanjutnya, pendidikan nasional kelihatannya cenderung gagal berperan sebagai perekat kohesi sosial masyarakat. Tanah Air kita yang dikenal keindahan alamnya bagai zamrud katulistiwa, dikenal pula dengan kekayaan nilai-nilai warisan budayanya yang tinggi, tetapi lebih satu dekade terakhir ini justru sering kali dihiasi kerusuhan sosial, anarkisme, dan berbagai tindakan kejam lainnya. Konflik sosial telah terjadi di berbagai wilayah, bahkan

akhir-akhir ini dunia kampus seakan tidak pernah berhenti bergolak dengan demonstrasi yang sering kali berakhir brutal. Perkelahian antar siswa pun sudah realitas rutin di kota-kota besar, yang seringkali membawa korban.

Perspektif Ekonomi dan Politik

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis memadai (Alhumami, 2012). Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Peran pendidikan sangatlah penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global. Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *knowledge-based economy* (KBE), yang mensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Karena itu, pendidikan sangat diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan-*education for the knowledge economy* (KBE). Dalam konteks itu, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Ketersediaan SDM bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global.

Dalam perspektif politik, menurut Alhumami (2012), pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kapasitas individu

untuk menjadi warga Negara yang baik (*good citizen*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme tersebut merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut seluruh komponen bangsa.

Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk *critical mass*, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakkan landasan sosial yang kukuh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik. Kelompok masyarakat kelas menengah itu merupakan pilar utama *civil society* yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

Dengan pemahaman yang demikian, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju Negara maju yang berkualitas, yang tercermin pada penguasaan iptek, kepribadian dengan landasan moral dan etika yang kuat, serta kemampuan mengembangkan nilai-nilai estetika untuk mencapai keunggulan bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, akan tercipta kemandirian bangsa yang menjadi determinan untuk dapat bersaing dalam kompetisi antarnegara dan mampu bertahan hidup dalam sistem dunia yang bertumpu pada persaingan bebas.

Jika demikian halnya, mengutip perspektif Bagir (2012), setiap upaya dan proses pendidikan haruslah mampu melihat dan menggarap seluruh aspek potensi kemanusiaan. Ia harus mampu mengembangkan suatu perspektif holistik sekaligus integratif. Dalam pemahaman seperti ini, kemampuan personal -eksistensial yang sedikit banyak bersifat spiritual dan kemampuan sosial adalah dasar sekaligus puncaknya. Ia bukan saja krusial dalam menentukan kebahagiaan

hidup seseorang, bahkan juga dalam penguasaan kemampuan-kemampuan teknis yang menentukan kesuksesan. Mengenai ini, penting diingat bahwa Abraham Maslow belakangan merasa perlu menjungkirbalikkan segitiga kebutuhan manusia yang dikembangkannya, karena pemenuhan kebutuhan spiritual-personal dan sosial ternyata justru menjadi dasar yang baik bagi pemenuhan kebutuhan fisik. Dan bukan sebaliknya.

Kegagalan pendidikan kita dalam mengembangkan kecerdasan sosial-emosional menyebabkan anak-anak kita tak memiliki kemampuan untuk mengembangkan emosi positif dan empati, yang sangat menentukan kesejahteraan psikologis dan sosial mereka: mudah patah semangat dan menyerah, mudah “galau”, tak punya solidaritas sosial-padaahal pertemanan merupakan sumber, bukan hanya kesuksesan, melainkan juga kebahagiaan. Kegagalan mengembangkan kecerdasan rohaniah membuat anak kita tak bahagia akibat keterasingan sumber keberadaannya sekaligus, meminjam William James, Kawan Agung (*The Great Socius*) nya (Bagir, 2012). Yang tak kurang penting, harus kita sadari bahwa kesuksesan materialistik sekalipun ditentukan juga oleh kecerdasan emosional dan spiritual: oleh kekuatan cita-cita (visi), *leadership*, karakter, kekuatan imajinasi, dan unsur-unsur sejenisnya. Daniel Goleman, sebagaimana dikutip Bagir (2012), dalam bukunya yang fenomenal, *Emotional Intelligence*, menyatakan, “*Kecerdasan emosional kita menentukan potensi kita untuk belajar ketrampilan praktis. Kompetensi emosional kita menunjukkan berapa banyak potensi kita yang telah diaplikasikan menjadi kemampuan yang bisa dipakai saat bekerja*”.

Mengenai spiritual intelligence, Danah Zohar dan Ian Campbell, masih dalam Bagir (2012), menyimpulkan bahwa kecerdasan rohaniah ini memberi kemampuan untuk bekerja secara adaptif-kompleks, yang lebih sesuai dengan lingkungan kegiatan yang luar biasa cepat berubah seperti yang terjadi sekarang ini. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu member penekanan pada pengembangan daya rohaniah,

yang melibatkan kegiatan-kegiatan spiritual yang berorientasi pada pembinaan hubungan vertical dengan sang Kawan Agung, kegiatan tafakur dan tadabur-yakni, selain kegiatan observasional-saintifik, refleksi intelektual-filosofis dan estetik. Ia juga menanamkan budi pekerti luhur, mengembangkan akhlak sosial, khususnya sikap empati, penuh cinta kasih, pemaaf, dan bebas rasa benci, pengembangan dan pelatihan etos hidup dan kerja yang baik. Termasuk etos kerja keras, kedisiplinan, ketelatenan, keuletan, dan sikap pantang menyerah.

Selanjutnya kemampuan imajinatif, yang terkait erat dengan kemampuan kreatif, mesti benar-benar digalakkan, termasuk pemberian ruang sebesar-besarnya bagi upaya belajar berkhayal (berimajinasi), mengeksplor seluas mungkin segala sesuatu dan mencoba-coba sebanyak-banyaknya, serta berpikir sebebaskan-bebasnya, termasuk untuk berbuat kesalahan (*trial and error*) sebanyak-banyaknya. Di sini menjadi penting pengembangan proses belajar mengajar berbasis proyek penelitian (*project-based learning*). Dalam konteks ini, pendidikan kesenian sangatlah sentral. Bukan saja dalam mendorong pengembangan daya imajinatif dan kreatif,serta memberikan rasa kepuasan (kebahagiaan) dari kemampuan mengapresiasi karya-karya keindahan, melainkan juga sebagai sarana melembutkan hati dan memperbaiki budi pekerti. Pendidikan bahasa juga bersifat sangat krusial, khususnya sebagai sarana pengembangan daya dan minat baca yang mendukung upaya perluasan horizon, dan peningkatan kemampuan literer (Bagir, 2012).

Sejalan dengan itu, pelajaran lain termasuk sejarah, dan sebagainya berperan penting, selain untuk keperluan perluasan pengetahuan dan wawasan, harus tetap diarahkan kepada pencapaian-pencapaian kemampuan rohaniah dan imajinatif. Bahkan pengembangan *skill* dan *entrepreneurship* juga tak boleh dibatasi hanya pada pelatihan vokasional dalam makna keterampilan praktis ataupun kemampuan berorganisasi, manajemen, dan berbagai

soft skill lainnya, tapi dalam makna asli kata *vocation* sebagai panggilan jiwa (*life calling*). Sebab, hanya dengan bekerja yang didorong oleh panggilan jiwa seperti ini, orang akan bekerja dengan penuh passion (kegairahan dan cinta), sehingga bekerja bisa menjadi sumber kebahagiaan serta, sekaligus, menghasilkan profesionalisme, *performance*, dan daya tahan maksimum.

KESIMPULAN

Menarik untuk direnungkan apa yang pernah dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi. Bagi Malaysia, kata Badawi, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia buka sekadar sesuatu yang mutlak atau sangat vital, melainkan persoalan hidup matinya Malaysia (Hafid Abbas, 2012). Jika Indonesia berpandangan sama, bahwa pendidikan adalah persoalan hidup matinya bangsa ini di masa depan, maka sudah waktunya bangsa ini membenahi pendidikan secara sungguh-sungguh pada semua dimensi persoalan pendidikan.

Untuk kepentingan para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi, bank data yang ada di *The Learning Curve report* merupakan informasi yang sangat berharga manakala ingin mencari tahu hubungan antara masukan (*input*) dan hasil pendidikan dalam konteks sosial ekonomi yang lebih luas. Mengapa demikian. Karena bank data itu memasukkan variabel penentu penting dalam pembangunan kualitas pendidikan (Suyanto, 2013). Pertama, pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, usia anak sekolah, serta gaji dan tingkat pendidikan guru input proses pendidikan. Kedua, tingkat literasi dan tingkat kelulusan dari sekolah dan perguruan tinggi sebagai hasil pendidikan. Ketiga, tingkat pengangguran nasional, pendapatan domestik bruto, dan usia harapan hidup sebagai hasil pendidikan dalam konteks sosial ekonomi.

Akhirnya, temuan penting lain yang perlu direnungkan dari *The Learning Curve Report*

adalah betapa menentukannya budaya dan kultur yang mengelilingi dan melingkupi dunia pendidikan, di samping investasi uang yang memadai, bagi setiap upaya untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan agar menjadi jauh lebih baik. Semoga dengan pengelolaan anggaran yang begitu besar dapat secepatnya terlihat dampaknya bagi pemajuan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas SDM dan kualitas moral, serta penguatan kohesi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. (2012, Nopember 5). Perspektif Pembangunan Pendidikan Nasional. *Media Indonesia*.
- Driana, Elin. (2013, Januari 11). Mutu Pendidikan Tanpa RSBI. *Kompas*.
- Bulkin, Farchan. (1986). Pendidikan: Merumuskan Masa Depan. Majalah *Prisma* No. 3, 1986. LP3ES. Jakarta.
- Bagir, Haidar. (2012, Desember 13). Pendidikan Yang Memanusiakan. Majalah *Tempo*, Edisi 17.
- Hafid, Abbas. (2013, Januari 26). Anggaran dan Pelapukan Pendidikan. *Kompas*.
- Hafid, Abbas. (2012, Desember 28). Pendidikan di Pusaran Kerawanan. *Kompas*.
- Sahasrad, Herdi. (2012). Diaspora Alumni IPTN Di Amerika: Nasionalisme Melawan Kekalahan, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban ULUMUL QUR'AN*, 01/XXI/2012. Lembaga Studi Agama dan Filsafat Kerjasama Ikatan Cendekiawam Muslim Indonesia.
- Suyanto. (2013, Januari 10). Negara Adikuasa Pendidikan. *Kompas*.